HARIAN SEPUTAR INDONESIA
SUMBER REFERENSI TERPERCAYA

Tanggal : 27 Februari 2013

Halaman : 23

Pembangunan Tol Cisumdawu

UU Pengadaan Tanah Bisa Digunakan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) optimistis, proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) bisa memanfaatkan Undang-Undang UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. Undang-undang yang memungkinkan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menyelesaikan sepenuhnya permasalahan pembebasan lahan itu berlaku efektif tahun ini.

"Dengan undang-undang baru tersebut, masalah pembebasan lahan akan menjadi kewenangan milik pemerintah. *Nah*, untuk proyek Tol Cisumdawu, akan diselesaikan Bina Marga karena ketidakmampuan pemerintah daerah menyelesaikan masalah lahan," kata Direktur Jenderal Bina Marga Djoko Muryanto di sela Konsultasi Regional Kemen PU, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, pengambilalihan masalah pembebasan lahan dilakukan saat investor telah siap. Saat ini proyek Tol Cisumdawu masih dipromosikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di luar negeri dan anggarannya pun telah siap.

ANTARA/WAHYU PUTRO A

Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan jalan tol di Jakarta baru-baru ini. Proyek Tol Cisumdawu dinilai bisa menggunakan UU Pembebasan Lahan dalam penyelesaiannya.

"Kita siapkan jika ada investor yang tertarik dan baru kita matangkan anggaran pembebasan lahannya secara keseluruhan," tuturnya.

Pembebasan lahan jalan Tol Cisumdawu yang akan diambil alih di antaranya adalah seksi I dan II. Menteri PU Djoko Kirmanto sebelumnya mengatakan, pihaknya tak keberatan keseluruhan pembebasan lahan tol Cisumdawu diambil alih oleh kementeriannya.

"Kalau pemda tidak mampu dan kita ada biayanya, saya tidak keberatan, *toh* itu bukan untuk swasta, nantinya kembali jadi milik kita semua dan memang ada hitung-hitungannya," kata dia.

Sebagaimana diketahui, proyek tol Cisumdawu atau Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road senilai USD779 juta merupakan salah satu proyek dengan skema kerja sama pemerintah swasta. Proyek ini masuk dalam sembilan proyek infrastruktur yang dipromosikan BKPM tahun 2013.

Proyek ini sempat terhambat, lantaran Pemda Jawa Barat (Jabar) tidak mampu melaksanakan proses pembebasan lahan karena anggaran yang tersedia tidak cukup. Kementerian PU lalu memberikan adendum terhadap naskah kerja sama dengan gubernur Jabar soal pendanaan pengadaan lahan tiga jalan tol di daerah ini, yang isinya di antaranya adalah mengubah skema pendanaan untuk pengadaan lahan jalan Tol Cisumdawu.

"Kalau pemerintah yang bebaskan lahannya, saya kira kami siap. Selama investor melalui skema kerja sama pemerintah swasta yang dipromosikan BKPM juga siap," ujarnya.

● ichsan amin